

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN MELALUI
PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
“SCHOOL BASED MANAGEMENT”**

Oleh:
Altje Tombokan
Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Manajemen berbasis sekolah “*school based management*” merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek mesonya berkaitan dengan kebijakan daerah tingkat propinsi sampai tingkat kabupaten dan kota, sedangkan aspek mikronya melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu sekolah. Pada sistem manajemen berbasis sekolah, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggung-jawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, manajemen berbasis sekolah tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Kata kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Mutu Pendidikan Kejuruan.

1 PENDAHULUAN

Banyak masalah mutu dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Mulyasa (2005), menyatakan berbagai program yang dilaksanakan telah memberikan harapan bagi kelangsungan dan terkendalinya kualitas pendidikan Indonesia semasa krisis. Akan tetapi, karena pengelolaannya yang terlalu kaku dan sentralistik, program itu tidak banyak memberikan dampak positif, angka partisipasi pendidikan nasional maupun kualitas pendidikan tetap menurun. Diduga hal tersebut erat kaitannya dengan masalah manajemen. Dalam kaitan ini, muncullah salah satu pemikiran ke arah pengolahan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Pemikiran ini dalam perjalanannya disebut manajemen berbasis sekolah atau *school based manajement*, yang telah berhasil mengangkat kondisi dan memecahkan berbagai masalah pendidikan di beberapa negara maju, seperti Australia dan Amerika.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah,

manajemen berbasis sekolah tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

BPPN dan Bank Dunia (1999), menjelaskan manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dituntut agar lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam konsep ini sekolah dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik kepada orang tua, masyarakat, maupun pemerintah.

Senada dengan hal tersebut Depdikbud (1999), mengemukakan manajemen berbasis sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Otonomi sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum tentang pemberdayaan sekolah, yang meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang berada di garis depan (*line staf*), yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan, dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut, yaitu guru dan kepala sekolah. Demikian juga Tilaar (2006), dengan tegas menyatakan masyarakat sebagai *mitra* pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan-serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penerapan manajemen berbasis sekolah menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Keberhasilan seperti ini ditemukan di Meksiko sebab pemerintah pusat telah melakukan pelatihan bagi personel yang dipekerjakan di berbagai tempat kerja yang diperlukan, malah di Chili menunjukkan adanya penurunan anggarannya yang besar (Fiske, 1996). Dalam pada itu, dituntut kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran di balik otonomi yang dimilikinya. Sekolah juga harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa menjadi anak yang mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas.

Manajemen berbasis sekolah memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam dewan sekolah di bawah monitoring pemerintah, mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan kepada sekolah untuk dapat menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik, guru, dan petugas lain yang ada di lingkungan sekolah.

2 PEMBAHASAN

2.1 Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Wibawa kepala sekolah harus ditumbuhkembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif. Lebih lanjut, kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsinya

sebagai manajer sekolah dalam meningkatkan proses belajar-mengajar, dengan melakukan penyediaan kelas, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru. Di samping itu, kepala sekolah juga harus melakukan tukar pikiran, sumbang saran, dan studi banding antar sekolah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala sekolah yang lain.

Dalam rangka menerapkan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, guru harus berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung para peserta didik di kelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan isi materi pengajaran. Guru juga harus mengorganisasikan kelasnya dengan baik. Jadwal pelajaran, pembagian tugas peserta didik, kebersihan, keindahan dan ketertiban kelas, pengaturan tempat duduk peserta didik, penempatan alat-alat dan lain-lain harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Suasana kelas yang menyenangkan dan penuh disiplin sangat diperlukan untuk mendorong semangat belajar peserta didik. Kreativitas dan daya cipta guru untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah perlu terus menerus didorong dan dikembangkan.

Sesuai dengan tuntutan tersebut, BPPN dan Bank dunia (1999), telah melakukan berbagai kajian, antara lain telah mengembangkan strategi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, yang meliputi pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, pentahapan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dan perangkat pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

2.2 Strategi Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Penerapan manajemen berbasis sekolah akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua). Krisis ekonomi telah memperlemah kemampuan bersekolah dan telah menimbulkan dampak negatif, yakni menurunnya jumlah peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi (kesempatan belajar di SLTP, SLTA dan PT tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain), menurunnya partisipasi masyarakat karena kerusakan terjadi di mana-mana, angka partisipasi pendidikan sama dengan yang telah dicapai negara-negara ASEAN lainnya 15-20 tahun yang lalu. Multi krisis telah memperburuk kondisi pendidikan, memperburuk fasilitas pembelajaran, serta menurunkan kondisi kesehatan dan kualitas pendidikan. Ironisnya, pada masa krisis justru pemerintah menurunkan anggaran pendidikan dari sekitar 8% pada Tahun anggaran 1998/1999 menjadi 6,7% pada Tahun 1999/2000 (Mulyasa, 2005).

Kondisi sekolah di Indonesia pada saat krisis sekarang ini sangat bervariasi dilihat dari segi kualitas, lokasi sekolah, dan partisipasi masyarakat (orang tua). Kualifikasi sekolah bervariasi dari sekolah yang sangat maju sampai sekolah yang sangat ketinggalan; sedangkan lokasi sekolah bervariasi dari sekolah yang terletak di perkotaan sampai sekolah yang letaknya di daerah terpencil. Demikian pula partisipasi masyarakat (orang tua), bervariasi dari yang berpartisipasi tinggi sampai yang kurang bahkan tidak berpartisipasi sama sekali. Kondisi-kondisi tersebut, tampaknya akan menjadi permasalahan yang rumit dan harus diprioritaskan penanganannya pascakrisis. Oleh karena itu, agar manajemen berbasis sekolah dapat diimplementasikan secara optimal, baik di era krisis maupun pada pascakrisis di masa mendatang, perlu adanya pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen masing-masing. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan.

2.2.1 Pengelompokan sekolah

Dalam rangka mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Dalam hal ini sedikit ditemui tiga kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan.

Perbedaan kemampuan manajemen, mengharuskan perlakuan yang berbeda terhadap setiap sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma baru yang ditawarkan manajemen berbasis sekolah. Misalnya, suatu sekolah mungkin hanya memerlukan pelatihan untuk mampu melaksanakan manajemen berbasis sekolah, namun sekolah lain barangkali memerlukan dukungan-dukungan tambahan dari pemerintah agar dapat menerapkan paradigma baru tersebut. Dengan mempertimbangkan kemampuan sekolah, kewajiban, dan kewenangan sekolah terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dapat dibedakan antara satu sekolah dan sekolah lain. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya-upaya maksimal bagi sekolah yang

kemampuan manajemennya kurang untuk mempersiapkan pelaksanaan MBS. Namun demikian, untuk jangka panjang MBS akan ditentukan oleh bagaimana suatu sekolah mampu menyusun rencana sekolah, dan melaksanakan rencana tersebut.

2.2.2 Pentahapan penerapan manajemen berbasis sekolah

Sebagai suatu paradigma pendidikan baru, selain perlu memperhatikan kondisi sekolah, penerapan manajemen berbasis sekolah juga memerlukan pentahapan yang tepat. Dengan perkataan lain, harus dilakukan secara bertahap. Penerapan manajemen berbasis sekolah secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan memerlukan perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menyangkut keuangan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia, yang juga diidentifikasi secara rinci oleh Bank Dunia, akan mempengaruhi kecepatan waktu pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, manajemen berbasis sekolah diyakini akan dapat dilaksanakan paling tidak melalui tiga tahap, yaitu jangka pendek (tahun pertama sampai dengan tahun ketiga), jangka menengah (tahun keempat sampai tahun keenam), dan jangka panjang (setelah tahun keenam).

Pelaksanaan jangka pendek diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan perubahan mendasar terhadap aspek-aspek pendidikan. Sebaliknya, strategi ini perlu ditekankan pada hal-hal yang bersifat sosialisasi manajemen berbasis sekolah terhadap masyarakat dan sekolah, pelatihan terhadap sumber daya manusia yang akan melaksanakan manajemen berbasis sekolah, dan mengalokasikan dana langsung ke sekolah sebagai praktek pengelolaan keuangan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Perlu ditekankan pula bahwa sosialisasi dan pelatihan mempunyai peranan yang sangat penting karena manajemen berbasis sekolah memerlukan adanya perubahan sikap dan perilaku tenaga kependidikan dan masyarakat yang selama ini berpola *top-down*. Apabila masyarakat dan sekolah telah memahami hak dan kewajiban masing-masing, perubahan-perubahan mendasar tentang aspek-aspek pendidikan dapat dilakukan, sebagai strategi jangka menengah, dan panjang dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Mengingat prioritas jangka pendek memerlukan strategi yang segera dapat ditindaklanjuti.

Mulyasa (2005), mengidentifikasi secara rinci kegiatan dan program yang perlu dipersiapkan. Kegiatan jangka pendek dipilih dengan mempertimbangkan alasan-alasan berikut: (a) Baik sekolah maupun masyarakat, pada saat ini, diyakini belum mengenal prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah secara rinci. Oleh karena itu, manajemen berbasis sekolah perlu disosialisasikan agar mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing. (b) Pengalokasian dana langsung ke sekolah merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi sekolah. Selama ini sekolah memperoleh dana yang pengalokasiannya melalui birokrasi yang kompleks dan mengikat. (c) Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah memerlukan tenaga yang memiliki keterampilan memadai, minimal mampu mengelola dan mengerti prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Selama ini tenaga yang ada, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat pengawas, kurang memiliki keterampilan dalam profesi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan agar dana yang dialokasikan secara langsung tersebut mampu dikelola sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. (d) Rekomendasi Bank Dunia merujuk pada dua hal, yaitu kurangnya otonomi kepala sekolah dalam mengelola keuangan sekolah di satu pihak, dan kurangnya kemampuan manajemen kepala sekolah di lain pihak. Oleh karena itu kepala sekolah perlu menjadi prioritas dalam memperoleh latihan.

Dalam kaitannya dengan pentahapan penerapan manajemen berbasis sekolah, secara garis besar, Fattah (2000), membaginya menjadi tiga tahap, yaitu: tahap sosialisasi, tahap piloting, dan tahap desiminasi, dengan penjelasan sebagai berikut: (a) Tahap sosialisasi, merupakan tahapan penting mengingat luasnya wilayah nusantara terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh media informasi, baik cetak maupun elektronik. Dalam pada itu, masyarakat Indonesia pada umumnya tidak mudah menerima perubahan. Banyak perubahan, baik personal maupun organisasional memerlukan pengetahuan dan keterampilan baru. Dengan begitu masyarakat dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungan yang baru. Dalam mengefektifkan pencapaian tujuan perubahan, diperlukan kejelasan tujuan dan cara yang tepat, baik menyangkut aspek proses maupun pengembangan (Whitaks, 1991 dalam Fattah, 2000). (b) Tahap piloting, merupakan tahap uji-coba agar penerapan konsep manajemen MBS tidak mengandung resiko. Efektivitas model uji coba memerlukan persyaratan dasar, yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, reflektivitas, dan sustainabilitas. Akseptabilitas artinya adanya penerimaan dari para tenaga kependidikan, khususnya guru dan kepala sekolah sebagai pelaksana dan penanggungjawab pendidikan di sekolah. Akuntabilitas artinya bahwa program MBS harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara konsep, operasional, maupun

pendanaannya. Reflikabilitas artinya model manajemen berbasis sekolah diujicobakan dapat direflikasi di sekolah lain, sehingga perlakuan yang diberikan kepada sekolah uji coba dapat dilaksanakan di sekolah lain. Sementara sustainabilitas artinya program tersebut dapat dijaga kesinambungannya setelah uji coba dilaksanakan. (c) Tahap disemilasi, merupakan tahapan memasyarakatkan model MBS yang telah diujicobakan ke berbagai sekolah agar dapat menerapkannya secara efektif dan efisien.

2.2.3 Perangkat penerapan manajemen berbasis sekolah

Penerapan manajemen berbasis sekolah memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman (*guidelines*) umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan. Perangkat penerapan perlu diperkenalkan sejak awal, melalui pelatihan-pelatihan yang disenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek.

Rencana sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Rencana sekolah merupakan perencanaan sekolah untuk jangka waktu tertentu, yang disusun oleh sekolah sendiri bersama dewan sekolah. Adapun yang dikandung rencana tersebut adalah visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan prioritas-prioritas yang akan dicapai, serta strategi-strategi untuk mencapainya. Dengan membaca rencana sekolah, seseorang akan memiliki gambaran lengkap tentang suatu sekolah. Untuk memotivasi sekolah membuat rencana yang baik perlu disediakan penghargaan terhadap sekolah yang berhasil mencapai kemajuan, seperti direncanakan dalam rencana sekolah. Sebaliknya, diberikan sanksi kepada sekolah yang tidak berhasil melaksanakan sesuai dengan rencana. Sanksi tersebut dapat berupa pengurangan dana tertentu pada anggaran berikutnya.

Keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan politik pemerintah (*political will*) sebagai penanggung jawab pendidikan. Kalau kemauan politik pemerintah sudah ada, pelaksanaannya sangat bergantung pada bagaimana kesiapan pelaksana dan perumus kebijakan dapat memperkecil kelemahan yang mungkin muncul dan mengeksplorasi manfaat semaksimal mungkin.

Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan di Indonesia, pelaksanaan model ini perlu dilakukan secara bertahap serta direncanakan secara matang dan profesional. Model ini bukanlah suatu jawaban dari semua permasalahan pendidikan yang dihadapi, namun dapat menjadi jawaban terhadap kebakuan dan kekakuan manajemen pendidikan yang berlaku selama ini. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tentu saja akan menghadapi berbagai benturan yang tidak dikehendaki karena mengubah kebiasaan masyarakat yang telah sekian lama melekat dan mendarah daging tidaklah mudah. Tahap awal perlu diambil barangkali adalah mempublikasikan model melalui media massa untuk mendapatkan tanggapan dan dukungan dari berbagai pihak secara luas. Hal ini penting dilakukan, terutama untuk meminimalisasi anggapan masyarakat tentang pola pendidikan yang selalu berubah-ubah, tanpa adanya kesan di kalangan masyarakat bahwa setiap perubahan yang dilakukan adalah menuju perbaikan dan kemajuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat.

3 KESIMPULAN

- 3.1 Manajemen berbasis sekolah memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam dewan sekolah di bawah monitoring pemerintah, mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab.
- 3.2 Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.
- 3.3 Peranan manajemen berbasis sekolah menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih.
- 3.4 Dalam rangka menerapkan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, guru harus berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung para peserta didik di kelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan isi materi pengajaran. Guru juga harus mengorganisasikan kelasnya dengan baik.

4 DAFTAR PUSTAKA

- Atmodiwirio, S. 2001. Manajemen Pendidikan Indonesia. Ardadizya Jaya. Jakarta.
- Balitbangdikbud. 1994. Seri Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Pendidikan Dasar. Depdikbud. Jakarta.
- BPPN dan Bank Dunia. 1999. School Based Management. BPPN dan Bank Dunia. Jakarta.
- Depdikbud. 1999. Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tenggala Landas. Depdikbud. Jakarta.
- Fattah, N. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Fiske, E.B. 1996. Decentralization of Education. Politics and Concensus. The World Bank. Washington DC.
- Gaffar. 1989. Perencanaan Pendidikan Teori dan Metodologi. P2LPTK. Jakarta.
- Kindervatter, S. 1979. Nonformal Education as An Empowering Process. Center for International education University of Massachusetts. Massachusetts.
- Mulyasa, E. 2005. Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi, dan Implementasi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pidarta, M. 1988. Manajemen Pendidikan Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tilaar, H.A.R. 2006. Manajemen Pendidikan Nasional. Kajian Pendidikan Masa Depan. Remaja Rosdakarya. Bandung.